



RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023

Alamat : Jalan. R.A. Kartini no. 35 Palu
Telp. 0451-422196

Email: dishub.sultengprov@gmail.com
Web : <http://dishub.sultengprov.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pendekatan program, perencanaan, penganggaran terpadu, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

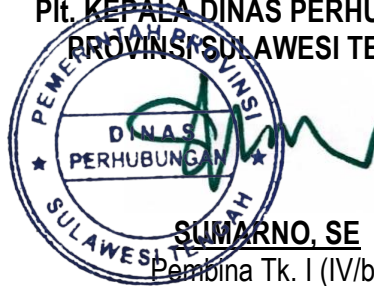
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan bagian dari penjabaran tahun III (ketiga) dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 serta telah melalui proses perencanaan yang terintegrasi dengan program pembangunan perhubungan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun tingkat Kementerian Perhubungan yang memuat indikasi program prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya dengan ketersediaan sumber daya, dana, dan alokasi anggaran yang dimiliki, sehingga dapat diketahui masalah dan kendala serta tantangan pembangunan yang dinilai dapat berpengaruh pada proses pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 dapat berjalan lancar dan program kerja tahun 2023 dapat terlaksana.

Palu, 6 Maret 2023

**Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



SUMARNO, SE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670527 199403 1 013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4 Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPd TAHUN LALU	II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP	II - 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023	II - 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III - 1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan	III - 3
3.3 Program dan Kegiatan	III - 4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV - 1
BAB V PENUTUP	V - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan sistem transportasi yang handal sebagai penggerak/pendorong pembangunan serta didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang professional, akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbagai sektor dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Rancangan pembangunan sektor transportasi dititikberatkan pada upaya meningkatkan aksesibilitas, pelayanan, keselamatan dan keamanan, yang efektif dan efisien, sehingga mobilitas manusia, barang serta jasa lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional dapat berjalan tertib, terpadu serta lancar yang akhirnya dapat mendukung pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal yang diindikasikan sebagai tersedianya jasa transportasi berkemampuan tinggi, kapasitas dan kualitas yang memadai, tepat waktu serta menjangkau seluruh wilayah/kawasan, terdapat berbagai peluang dan kendala diantaranya adalah perubahan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, terjadinya globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya keterbatasan sumber daya.

Oleh karena itu, sistem transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga terwujud kehandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi. Di samping itu, sistem transportasi juga perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan dan kebijakan energi, sehingga akan selalu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta kebutuhan perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kehandalan serta kelaikan sarana transportasi.

Sejalan dengan sistem transportasi yang ada, maka sistem transportasi di Sulawesi Tengah sangat perlu ditingkatkan baik dari segi sarana dan prasarana dalam

rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari implementasi Visi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal”.

Dari perwujudan tersebut maka sebagai instansi yang menjalankan program pemerintah daerah perlu adanya penyelenggaraan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan produksi daerah Sulawesi Tengah melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi, sehingga dapat mendukung tercapainya visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ***“Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”.***

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah) Tahun 2023 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yaitu; dokumen ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Cetak Biru Kementerian Perhubungan serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 terutama yang menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi Kebijakan Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan kebijakan pemerintah. Dokumen RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD dengan memperhatikan kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atsa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomorhgsffhghsgf 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan (2005 – 2025);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan (2005 – 2025);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman Dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanapembangunan Daerah;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp. 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
23. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Kementerian Perhubungan Dengan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Indikasi Rencana Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2016;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 No. 6);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam tahun anggaran;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2023;
3. Sebagai bahan untuk mengevaluasi keberhasilan RPJM yang telah disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan visi dan misi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan "Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Capaian kinerja pelayanan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah di ukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IK K (P P-6/08)	Target Renstra SKPD 2021-2026 (Tahun Ke-)					Realisasi Capaian		Proyeksi Realisasi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
				Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	Tahun N+2	Tahun N-2	Tahun N-1	Tahun N	Tahun N+1	Tahun N+2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	%		60%	70%	80%	90%	100%	69%	-	72,45 %	85,16 %	97,86 %	
2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	RASIO		0,1000	0,0098	0,0093	0,0091	0,0091	0,012	-	0,0098	0,0095	0,0093	Formulasi Perhitungan Persentase penurunan kecelakaan transportasi ialah Jumlah kecelakaan pada tahun n dikurangi jumlah kecelakaan tahun awal perencanaan dibagi jumlah kecelakaan pada tahun awal perencanaan

2.1.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah\

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	15	01								
2	15	01								
2	15	01								
2	15	01	1,01							
2	15	01	01							
2	15	01	1,01	02						
2	15	01	1,01	03						
2	15	01	1,01	06						
2	15	01	1,01	07						
2	15	01	1,02							
2	15	01	1,02	01						

2	15	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	12	12	12	100	0	12	100,00%
2	15	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410	n/a	N/A	0	0	0	0	0,00%
2	15	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	2	200,00%
2	15	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	1	1	1	100	1	2	200,00%
2	15	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	98,50	n/a	100	66,67	67	100	166,67	166,67%
2	15	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	n/a	3	2	67	6	8	200,00%
2	15	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	n/a	3	2	67	6	8	200,00%
2	15	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100,00%
2	15	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	n/a	7	7	100	1	8	800,00%
2	15	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan	100	n/a	4	4	100	1	5	500,00%
2	15	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	n/a	4	4	100	2	6	300,00%
2	15	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang di sediakan	100	n/a	7	7	100	1	8	800,00%

2	15	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	n/a	12	12	100	12	24	200,00%
2	15	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	6 Laporan	n/a	0	0	100	100	100	100,00%
2	15	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	n/a	0	0	0	2	2	200,00%
2	15	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Buah	n/a	0	0	0	6	6	600%
2	15	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	4 Laporan	100	100	100	100	100	200	200,00%
2	15	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	131 Buah	12	12	12	100	12	24	200,00%
2	15	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	8459 kWh/bulan	12	12	12	100	12	24	200,00%
2	15	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Buah	12	12	12	100	12	24	200,00%
2	15	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2428 Orang	0	0	0	100	12	12	100,00%
2	15	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	100	100	100	100	100	200	200,00%
2	15	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	n/a	27	27	100	27	54	450,00%
2	15	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	4 Gedung	n/a	0	6	0	1	7	175,00%
2	15	01	1,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di Pelihara/ di Rehabilitasi	6 Unit	n/a	0	1	0	1	2	200,00%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	n/a	70,08	77,5	110,59	70,15%	78,2	111,36%
2	15	02	1,02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100%	n/a	25%	25,00%	100	50%	0,75	100,00%

2	15	02	1,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Yang Tersedia	12 Buah LPJU 19947 Meter Marka 322 Buah Rambu 6 Buah RPPJ 240 Meter Guadrail	n/a	12	12	100	12	24	200,00%
2	15	02	1,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitas dan Terpelihara	3 Buah LPJU 46 Buah Rambu	n/a	1	1	100	1	2	200,00%
2	15	02	1,05		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 dokumen	n/a	0	0	0	100	100	10000,00%
2	15	02	1,05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 dokumen	n/a	0	0	0	1	1	100,00%
2	15	02	1,03		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Terminal Penumpang Tipe B Yang di Kelola	2 Unit	80	100%	100%	100	100	101	10100,00%
2	15	02	1,03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Yang di Lakukan Pengembangan	2 unit	n/a	0	0	0	2	2	100,00%
2	15	02	1,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Yang Terehabilitas dan Terpelihara	2 unit	n/a	0	0	0	2	2	100,00%
2	15	02	1,06		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Andalalin Yang Di setuju	100%	80	100%	100%	100	100	101	10100,00%
2	15	02	1,06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6150	5587	5700	5300	93	5950	11250	182,93%
2	15	02	1,06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Rekomendasi Andalalin Yang Terawasi	4000	n/a	6000	6000	100	4000	10000	250,00%
2	15	02	1,07		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	75%	n/a	55%	62,50%	113,64	63%	1,26	167,33%
2	15	02	1,07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	1	n/a	1	1	100	1	2	200,00%
2	15	02	1,07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4	n/a	4	4	100	3	7	175,00%
2	15	02	1,07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	n/a		1		1	1	100,00%
2	15	02	1,07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	65 Orang	n/a	2	52	2600%	2	54	83,08%

2	15	02	1,07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 dokumen	n/a	1	1	100%	1	2	200,00%
2	15	02	1,10		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90%	n/a	70%	54%	77,14	80%	1,34	148,89%
2	15	02	1,10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Kewenangan Provinsi	2	n/a	2	2	100	2	4	200,00%
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Yang di Kelola	0,36	n/a	0,4	0,4	100	0,38	0,78	216,67%
2	15	03	1,01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Laporan Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	0,36	n/a	0,4	0,4	100	0,38	0,78	216,67%
2	15	03	1,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	5	4	5	5	100	25	30	600,00%
2	15	03	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25	n/a	26	27	104	25	52	208,00%
2	15	03	1,02		- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Laporan Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	2	n/a	0	0	0	2	2	100,00%

2	15	03	1,02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	n/a	0	0	0	12	12	100,00%
2	15	03	1,03		Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Pelabuhan yang dikelola	85%	n/a	65%	60%	92,31	75%	1,35	158,82%
2	15	03	1,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1	n/a	0	0	#DIV/0!	1	1	100,00%
2	15	03	1,05		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	25	n/a	5	5	100	15	20	80,00%
2	15	03	1,05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi	100%	n/a	100%	100%	100	100%	2	200,00%
2	15	03	1,06		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	87,78%	91%	83,33%	83,33%	100	85,56%	1,69	192,41%

2	15	03	1,06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2	n/a	4	4	100	2	6	300,00%
2	15	03	1,07		Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen hasil analisis tarif	90%	n/a	30%	100%	333,33	70%	1,7	188,89%
2	15	03	1,07	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Anali-sis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas E-konomi dan Kendaraan serta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kab/Kota	1	n/a	1	0	0	1	1	100,00%
2	15	03	1,09		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan yang di kelola	88%	n/a	45%	63%	140	80%	1,43	162,16%
2	15	03	1,09	02	Pembangunan Pelabuhan Pen	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun	77%	n/a	64%	63%	98	70%	1,33	172,77%
2	15	03	1,09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Beroperasi dan Terpelihara	1	n/a	1	1	100	1	2	200,00%
2	15	03	1,09	04	Pengawasan Pengoperasian P	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1	1	0	0	0	4	4	400,00%
2	15	03	1,10		Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelabuhan yang di kelola	1 Pelabuhan	n/a	1	1	100	1	2	200%
2	15	03	1,10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota Da-lam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang di Lakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1	n/a	1	1	1	1	1	100
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Pengelolaan Perkeretaapian	100%	n/a	100	100	100	100	200	200%
2	15	05	1,02		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Persentase Pengelolaan Perkeretaapian	1 dokumen	n/a	1	1	100	1	2	200%

2	15	05	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Daerah	1	n/a	1	1	100	1	2	200%
---	----	----	------	----	--	--	---	-----	---	---	-----	---	---	------

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Transportasi Darat

- Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Jalan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
 - a. Fasilitas Keselamatan Barupa Rambu, Pagar Maupun Marka Jalan Serta Fasilitas Penunjang Lainnya Masih Minim;
 - b. Jumlah Pelayanan Angkutan Belum Memadai.
- Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas Jalan
- Peningkatan Pelayanan Terminal
- Peningkatan kajian studi kelayakan penentuan lokasi trase
- Peningkatan Sumber Daya Aparatur

2. Transportasi laut

- Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Laut
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Laut
 - a. Peningkatan Aksesibilitas Transportasi Laut
 - b. Sarana Navigasi Masih Minim
- Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Transportasi Laut
- Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Adapun hasil analisis kebutuhan awal pada rancangan renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang disusun dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2022**

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatf (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatf (Rp)	Catatan Penting
					24,013,727,076					24,013,727,076	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Palu				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Palu				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	179,147,850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	179,147,850	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,965,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,965,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,337,500	Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,337,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	5,537,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	5,537,500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Laporan	480,100,325	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Laporan	480,100,325	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Tingkat Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,480,347,758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Tingkat Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,480,347,758	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	801,168,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu	Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	801,168,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Kota Palu	Persentase Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	1 Dokumen	4,201,400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Kota Palu	Persentase Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	1 Dokumen	4,201,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	15,299,950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	15,299,950	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanar/Semesestrian/SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	90,255,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanar/Semesestrian/SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	90,255,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	173,250,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	173,250,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	56,250,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	56,250,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,916,254	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,916,254	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78,687,250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78,687,250	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38,273,050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38,273,050	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707,441,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707,441,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	34,092,540	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	34,092,540	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	64,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	64,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	883,594,479	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	883,594,479	
	Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu				Jasa Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,708,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Unit	15,708,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	224,386,426	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	224,386,426	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Persentase terselenggaranya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	113,679,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Persentase terselenggaranya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	113,679,000	
	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	619,229,000	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	619,229,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	448,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	448,200,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	5 Unit	391,979,900	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi	5 Unit	391,979,900	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Peliharaan/Direhabilitas	2 Unit	499,654,000	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Peliharaan/Direhabilitas	2 Unit	499,654,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Palu									
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Palu				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Palu				

	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Palu	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi Yang Tersedia	9000 Meter Marka 493 Buah Rambu	2,595,977,124	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Kota Palu	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi Yang Tersedia	9000 Meter Marka 493 Buah Rambu	2,595,977,124
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kota Palu	Jumlah Perengkapan Jalan Yang Terehabilitasi dan Terpelihara	26 Buah LPJU 30 Buah	116,791,200	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kota Palu	Jumlah Perengkapan Jalan Yang Terehabilitasi dan Terpelihara	26 Buah LPJU 30 Buah	116,791,200
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kota Palu				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kota Palu			
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen	113,900,000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen	113,900,000
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	Kota Palu				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	Kota Palu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Palu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	8 Dokumen	46,801,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Palu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	8 Dokumen	46,801,500
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Andalalin Yang Terawasi	10 Laporan	26,069,500	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Andalalin Yang Terawasi	10 Laporan	26,069,500
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Palu				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Palu			
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspeksi LLAJ	Kota Palu	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	38,514,300	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kota Palu	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	38,514,300
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Palu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	41,819,750	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Palu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	41,819,750
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Palu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Dokumen	670,439,650	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Palu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	670,439,650
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu			
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Kewenangan Provinsi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	96,529,700	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Kewenangan Provinsi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	96,529,700
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Palu				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Palu			
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Palu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	43,578,000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Palu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	43,578,000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Kota Palu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	157,151,470	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Kota Palu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	157,151,470
	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Daerah	Kota Palu				Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Daerah	Kota Palu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Daerah	1 Laporan	16,185,850	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Daerah	1 Laporan	16,185,850
	Pengelolaan Terminal Pengumpang Tipe B	Kota Palu				Pengelolaan Terminal Pengumpang Tipe B	Kota Palu			
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Yang di Lakukan Pengembangan	2 Unit	17,825,000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Yang di Lakukan Pengembangan	2 Unit	17,825,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palu	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	28030500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Palu	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	28030500
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kota Palu				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kota Palu			
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Kota Palu				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Kota Palu			
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kota Palu	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun	2 Pelabuhan	1,400,000,000	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kota Palu	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun	2 Pelabuhan	1,400,000,000
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kota Palu	Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Pelabuhan	400,000,000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kota Palu	Pelabuhan Pengumpan Regional Yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Pelabuhan	400,000,000
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	130050100	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	130050100
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Kota Palu				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Kota Palu			
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Memenuhi Persyaratan Perizinan	2 Unit	30,315,100	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Memenuhi Persyaratan Perizinan	2 Unit	30,315,100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Kota Palu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	2 Laporan	25,179,600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Kota Palu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	2 Laporan	25,179,600

	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Kota Palu	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	2 Unit	9,830,050	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Kota Palu	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	2 Unit	9,830,050		
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Kota Palu				Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Kota Palu					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Kota Palu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	33,306,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Kota Palu	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	33,306,000		
	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Yang Bersangkutan	Kota Palu				Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Yang Bersangkutan	Kota Palu					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Kota Palu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	2 Laporan	41,358,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Kota Palu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	2 Laporan	41,358,000		
	Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyebrangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Palu				Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyebrangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Palu					
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyebrangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	Kota Palu	Jumlah Laporan Lintas Penyebrangan dan Disetujui-nya Pengoperasian Kapal Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi	2 Laporan	57,550,000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyebrangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	Kota Palu	Jumlah Laporan Lintas Penyebrangan dan Disetujui-nya Pengoperasian Kapal Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi	2 Laporan	57,550,000		
	Penetapan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyebrangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	Kota Palu				Penetapan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyebrangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	Kota Palu					
	Analisis Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyebrangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyebrangan Antar Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	45,087,500	Analisis Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyebrangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas E-konomi dan Kendaraan serta Muatannya Pada Lintas Penyebrangan Antar Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	45,087,500		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Palu				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Palu					
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Palu	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang di Lakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	3 Unit	400736000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kota Palu	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang di Lakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	3 Unit	400736000		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023

Usulan program dan kegiatan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui dana APBD telah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada kebijakan peningkatan pelayanan transportasi baik Darat, Laut. Sasaran strategis yang dapat ditempuh adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas transportasi pada daerah-daerah terpencil dengan menyiapkan sarana dan prasarana transportasi.

Pada Tahun 2023 ini telah diusulkan melalui belanja langsung 4 (Empat) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dengan nilai Rp.24.013.727.076 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Rp. 17.430.701.182
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Rp. 2.979.873.374
3. Program Pengelolaan Pelayaran
Rp. 2.573.412.350
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian
Rp. 1.029.740.170

Usulan tersebut merupakan usulan berdasarkan skala prioritas yang nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah dan yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan masyarakat.

Usulan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.1. Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	%	
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100 ribu Keberangkatan	%	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	
5.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	buah	
5.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	buah	
5.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		
5.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
5.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
5.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Andalalin Yang Di setujui		
5.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
5.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Unit	
5.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dokumen	
5.02.1.07.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dokumen	
5.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	
5.02.1.07.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	dokumen	
5.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	dokumen	
5.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	
5.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B Yang di Kelola	dokumen	
5.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	laporan	
5.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	laporan	
5.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Orang	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
5.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
5.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Terminal	
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pengelolaan Perkeretaapian	Terminal	
5.05.1.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi	Terminal	
5.05.1.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terminal	
5.05.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	dokumen	
5.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dokumen	
5.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	persen	
5.05.1.03.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	izin	
5.05.1.04	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	laporan	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
5.05.1.04.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang ditetapkan	laporan	
5.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	laporan	
5.05.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	laporan	
5.05.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	kegiatan	
5.05.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	laporan	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pelabuhan Yang Dikelola	laporan	
5.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	dokumen	
5.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	laporan	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
5.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	laporan	
5.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	laporan	
5.03.1.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Pelabuhan	
5.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	laporan	
5.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	laporan	
5.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Pelabuhan yang di kelola	laporan	
5.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	laporan	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
5.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	laporan	
5.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	laporan	
5.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Pelabuhan yang di kelola	laporan	
5.03.1.10.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pelabuhan	
5.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Pelabuhan	
5.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Pelabuhan	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
5.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelabuhan	
5.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelabuhan	
5.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	Pelabuhan	
5.03.1.07.01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (<i>customer/stakeholder</i>)	Dokumen	
		Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai SAKIP	%	
5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	
5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	
5.1.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	
5.1.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	
5.1.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	
5.1.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	
5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	laporan	
5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	
		Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah		laporan	
5.1.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penquian/Verifikasi Keuangan SKPD	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD		
5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	buah	
5.1.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	
5.1.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	laporan	
5.1.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	laporan	
		Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah		baju olahraga	
		Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah		pakaian dinas upacara besar (PDUB) dan kelengkapannya	
5.1.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	pelampung jaket	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
5.1.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa dan Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang	
5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	laporan	
5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persen	
5.1.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	persen	
5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persen	
5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persen	
5.1.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	
5.1.01.107.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	laporan	
5.1.01.107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	
5.1.01.107.05	Pengadaan Mebel	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	
5.1.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Set	
5.1.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	buah	
5.1.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	buah	
5.1.01.108.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KWH / bulan	
5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	buah	
5.1.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang	
5.1.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	laporan	
5.1.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jasa	
5.1.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	gedung	
5.1.01.109.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2021-2026 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing perekonomian dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. Memantapkan jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien.

Oleh karenanya pembangunan perhubungan dalam kurun waktu 2021-2026 bertujuan untuk mendukung perwujudan Provinsi Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan efektif dan efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan Daerah. Penyelenggaraan pelayanan transportasi yang efektif berkaitan dengan infrastruktur, ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat. Yang menjadi tujuan dan sasaran untuk dicapai Dinas Perhubungan, Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	MENINGKATKAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT		RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI	RASIO	0,574	0,584	0,604	0,614	0,624
		MENINGKATNYA KUALITAS TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI	PERSEN	60%	70%	80%	90%	100%
		MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI PER 100 RIBU KEBERANGKATAN	RASIO	0,1000	0,0098	0,0093	0,0091	0,0091

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun kedepan diselaraskan dengan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta program prioritas dalam RPJMD. Dinas Perhubungan menggunakan konsep pendekatan perencanaan tataran transportasi wilayah dengan tersedianya jaringan transportasi yang efektif, efisien terpadu antar dan intermodal berkesinambungan dan ramah lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI IV : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut.	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi darat dan laut	Peningkatan kualitas penyelenggaraan transportasi darat dan laut
		Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Peningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi
		Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman damai	Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan jasa perhubungan

3.1. Rencana Kerja OPD Tahun 2023

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 harus memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026. Pada Tahun 2023 ini telah diusulkan Rencana Kerja melalui belanja langsung 4 (empat) program dan 21 (Dua Satu) kegiatan dengan nilai Rp. 24.013.727.076 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Rp. 17.430.701.182
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Rp. 2.979.873.374
3. Program Pengelolaan Pelayaran
Rp. 2.573.412.350
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian
Rp. 1.029.740.170

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, serta merujuk kepada hasil evaluasi kinerja tahun 2022 sebagaimana dibahas sebelumnya, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan aspek seperti kondisi, permasalahan, dan isu strategis.

Secara garis besar Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terdiri dari 4 program, 21 kegiatan, dengan total pendanaan sebesar Rp. 24.013.727.076,- yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat beberapa penyesuaian usulan program kegiatan serta pagu indikatifnya sebagaimana hasil formulasi dari hasil rangkaian pembahasan subtransi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses rapat kerja teknis

Tabel 4. 1 Rencana, Kerja dan Pendanaan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan															
Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah								
					T								T+1		
										Belanja		Jumlah			
										Transfe r					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 =	15		
												(10+11+12+13)			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		21.146.266.498	2.867.460.578	0	0	24.013.727.076				
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		16.483.106.703	947.594.479	0	0	17.430.701.182				

2	1	1	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		672.088.175	0	0	0	672.088.175	
2	1	1	1.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
2	1	1	1.0	2	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Palu, Semua Kecamatan	3.965.000	0	0	0	3.965.000	

						Dokumen RKA- SKPD	, Semua Kelurahan												
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah							
1	2	3	4	5			6	7	8	T				T+1
										9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14 = (10+11+12+13)	15	
2	15	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan,		3.337.500	0	0	0	3.337.500		

					Semua Kelurahan								
2	15	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.537.500	0	0	0	5.537.500		

Kode	Uraian	Lokasi	Jumlah				
			T				T+1
					Belanja Transferr	Jumlah	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	1	1. 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Toli Toli,		480.100.325	0	0	0	480.100.325	

					<p>Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Morowali,</p> <p>Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;</p> <p>Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.391.272.108	0	0	0					12.391.272.108		
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah							
1	2	3	4	5			T					T+1		
							9	10	11	12	13		14 = (10+11+12+13)	
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		801.168.000	0	0	0	0	801.168.000	

2	15	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.201.400	0	0	0	4.201.400	
2	15	1	1.02	5		Kota Palu, Semua		15.299.950	0	0	0	15.299.950	

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
							T				T+1		
1	2	3	4	5			9	10	11	12		13	Belanja Transfer
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15

2	15	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.255.000	0	0	0	90.255.000	
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			229.500.000	0	0	0	229.500.000
2	15	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							

2	15	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.250.000	0	0	0	56.250.000							
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				877.410.094	0	0	0							877.410.094

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah							
1	2	3	4	5			6	8	9	T				T+1
										10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.916.254	0	0	0	18.916.254		

2	15	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.687.250	0	0	0	78.687.250
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.092.540	0	0	0	34.092.540

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah							
1	2	3	4	5			8	9	T			T+1		
									10	11	12		Belanja Transfer	Jumlah
					6						15			
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38.273.050	0	0	0	14 = (10+11+12+13)	38.273.050	

2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	707.441.000	0	0	0	707.441.000	
2	15	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	947.594.479	0	0	947.594.479
2	15	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
1	2	3	4	5			T					T+1	
							9	10	11	12	13		Belanja Transfer
					6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	883.594.479	0	0	883.594.479	

2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			973.002.426	0	0	0		973.002.426
2	15	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
2	15	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu, Semua Kecamatan,		224.386.426	0	0	0	224.386.426	

							Semua Kelurahan							
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
								T			T+1		
									Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan,		113.679.000	0	0	0	113.679.000	

						Semua Kelurahan							
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	619.229.000	0	0	0	619.229.000		

2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.339.833.900	0	0	0	1.339.833.900
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah							
1	2	3	4	5			6	8	9	T				T+1
										10	11	12	13	
2	15	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan,		391.979.900	0	0	0	0	391.979.900	

					<p>Semua Kelurahan;</p> <p>Kab. Toli Toli,</p> <p>Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;</p> <p>Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan,</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Semua Kelurahan						
2	15	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499.654.000	0	0	0	499.654.000	

2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2.073.561.595	1.919.866.099	0	0		3.993.427.694
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		792.902.225	1.919.866.099	0	0		2.712.768.324

Kode					Uraian	Jumlah						
							T					T+1
										Belanja	Jumlah	
										Transfer		

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14 =	15
											(10+11+12+13)	
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		116.791.200	0	0	0	116.791.200	

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
							T					T+1	
1	2	3	4	5						Belanja Transfe r	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 =	15

													(10+11+12+13)			
2	15	2	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B							45.855.500	0	0	0	45.855.500
2	15	2	1.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal											
2	15	2	1.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;		28.030.500	0	0	0	28.030.500				

						Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan							
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			113.900.000	0	0	0		113.900.00 0
2	15	2	1.05	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi								

2	15	2	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		72.871.000	0	0	0	72.871.000
---	----	---	------	--	--	--	------------	---	---	---	------------

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
							T				T+1		
1	2	3	4	5			9	10	11	12		13	14 = (10+11+12+13)
2	15	2	1.07	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.819.750	0	0	0	41.819.750	

2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.578.000	0	0	0	43.578.000	
2	15	2	1.07	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan	Kota Palu, Semua Kecamatan,		157.151.470	0	0	0	157.151.470	

					Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Semua Kelurahan								
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Uraian	Lokasi	Jumlah				
			T	Belanja		Jumlah	T+1

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
											Transfer		
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		670.439.650	0	0	0	670.439.650	

2	15	2	1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			96.529.700	0	0	0	96.529.700
2	15	2	1.10	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.529.700	0	0	0	96.529.700	
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		2.573.412.350	0	0	0	2.573.412.350

2	15	3	1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi						
---	----	---	------	---	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
							T						T+1
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 =	15
											Belanja	Jumlah	
											Transfer		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 =	15
												(10+11+12+13)	
2	15	3	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Banggai,		41.358.000	0	0	0	41.358.000	

					Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan								
					Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
					Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani								
					Penyeberangan Lintas								

					Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
					Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan									
					Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah									
					Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									

2	1	3	1.0					57.550.0	0	0	0	57.550.0	
	5		5					00				00	
2	1	3	1.0	2		Kab. Banggai,		57.550.0	0	0	0	57.550.000	
	5		5			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Banggai		00					
						Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan;							
						Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

					Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan								
					Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan								
					Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas								

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait								
					Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan								
					Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait								
					dengan Angkutan Laut, Tally								

					Mandiri, dan Depo Peti Kemas									
2	1 5	3	1.0 6					33.306.0 00	0	0	0		33.306.0 00	
2	1 5	3	1.0 6	2		Kota Palu, Semua Kecamatan,Se mua Kelurahan		33.306.0 00	0	0	0	33.306.000		

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
1	2	3	4	5			T						T+1
							6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 =	15

												(10+11+12+13)	
2	15	3	1.09	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.050.100	0	0	0	130.050.100		
2	15	3	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			400.736.000	0	0	0		400.736.000
2	15	3	1.10	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani	Kab. Banggai,	400.736.000	0	0	0	400.736.000		

				Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	15	5		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			16.185.850	0	0	0	16.185.850
2	15	5	1.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah							

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
							T						Belanja Transfer
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
2	15	5	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.185.850	0	0	0	16.185.850	

Jalurnya Melintasi
Batas Daerah

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp1.034.658.499
Februari	Rp1.484.741.947
Maret	Rp2.318.644.685
April	Rp2.870.978.499
Mei	Rp2.282.910.710
Juni	Rp3.303.652.568
Juli	Rp3.694.038.788
Agustus	Rp1.806.358.922
September	Rp1.735.894.806
Oktober	Rp1.702.128.408
November	Rp1.083.513.549
Desember	Rp696.205.695

Palu, tanggal 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

SISLIANDY, S.STP, M.Si
NIP: 197807071997121001

Mengesahkan,
PPKD

Jumlah		Rp24.013.727.076		
		BAHRAN, SE, MM		
		NIP: 196501011990031044		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

BAB V

PENUTUP

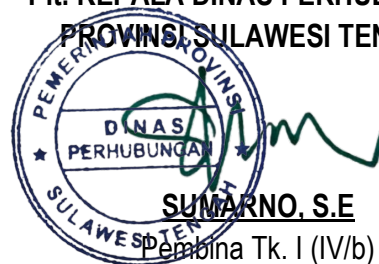
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan 2022.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja yang selanjutnya selalu dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja yang selama ini dilaksanakan.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 6 Maret 2023

**Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



SUMARNO, S.E

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670527 199403 1 013